

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, yang pertama yaitu tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dasar dari variabel yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Setelah itu membahas tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan tentang model variabel, lalu diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1.1. Pengertian UMKM

Menurut Rudjito (2003) “Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Usaha menengah adalah

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

2.1.1.2. Kriteria UMKM

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 pasal 6 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.1.3. Data Kredit UMKM

Data kredit UMKM berdasarkan definisi dan kriteria usaha dalam undang-undang No. 20 Tahun 2008 dan data kredit MKM berdasarkan definisi plafon yaitu:

1. Kredit mikro dengan plafon sampai dengan Rp. 50 juta.
2. Kredit kecil dengan plafon lebih dari Rp. 50 juta – Rp. 500 juta.
3. Kredit menengah dengan plafon lebih dari Rp. 500 juta – Rp. 5 miliar.

2.1.1.4. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Prinsip pemberdayaan UMKM yang tertuang pada pasal 4 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM yaitu:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
2. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
3. Peningkatan daya saing UMKM; dan
4. Penyelenggara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan tujuan pemberdayaan UMKM yang telah tertuang pada pasal 5 UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

2. Menumbuh dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.1.1.5. Klasifikasi UMKM di Indonesia

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka, sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

2.1.1.6. Tantangan dan Masalah UMKM

Secara lebih spesifik masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah:

1. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
4. Keterbatasan jaringan usaha kerja sama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
5. Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan.
6. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi UMKM dapat dibagi dalam dua kategori berikut.

1. Bagi usaha dengan omzet kurang dari Rp. 300 juta per tahun umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan aman sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar

untuk ekspansi produksi. Biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran *cashflow* saja.

2. Bagi usaha dengan omzet antara Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 miliar setahun, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan pusat konsultasi pengusaha kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh usaha jenis ini adalah (Kuncoro, 1997):
 - a. Masalah belum adanya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
 - b. Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman, baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan UMKM mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi.
 - c. Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.
 - d. Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah.
 - e. Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku.

- f. Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti.
- g. Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

2.1.1.7. Strategi Pemberdayaan UMKM

Strategi pemberdayaan UMKM yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam:

1. Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/omzet/tingkat utilitas/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudian kredit (KUPeDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/ Midi, Kku).
3. Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*), keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura, ataupun subkontrak.
4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, baik berbentuk PIK (Permukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) ataupun TPI (Tenaga Penyuluh Industri).

5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

2.1.2. Kredit

2.1.2.1. Pengertian Kredit

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Yang menjadi

perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

2.1.2.2. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal dengan bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.2.3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut.

- Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah.

- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
- Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara.
- Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegiatan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.2.4. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. Contoh kredit investasi misal untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Dalam arti lain kredit modal kerja adalah layanan kredit berupa pinjaman modal kerja untuk membantu mengembangkan UMKM atau perorangan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

b. Kredit Konsumtif

Digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang membayarnya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contohnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Contohnya kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha atau karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.1.2.5. Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apa pun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengaman yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus

disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dan risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambalnya.

1. Kredit Dengan Jaminan

a. Jaminan benda berwujud

Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti:

- Tanah
- Bangunan
- Kendaraan bermotor
- Mesin-mesin/ peralatan
- Barang dagangan
- Tanaman/ kebun/ sawah
- Dan lainnya

b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti:

- Sertifikat saham
- Sertifikat obligasi
- Sertifikat tanah
- Serifikat defosito
- Rekening tabungan yang dibekukan
- Rekening giro yang dibekukan.
- Promes

- Wesel
- Dan surat tagihan lainnya

c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain, orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

2.1.2.6. Kualitas Kredit

Banyak cara yang dapat dilakukan agar kualitas kredit meningkat atau kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Untuk menghindari kredit yang disalurkan bermasalah, maka dalam melepas kreditnya pihak perbankan perlu memperhatikan ada dua unsur penting, yaitu :

1. Tingkat perolehan laba (*return*)

Artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit dalam suatu periode. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang

berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya. Perbankan harus menerapkan target yang akan dicapai.

2. Tingkat risiko (*risk*)

Artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan.

Dalam rangka memenuhi tingkat perolehan laba, perbankan harus memperhatikan faktor-faktor seperti:

- 1) Tingkat *Return On Assets* (ROA);
- 2) *Return On Equity* (ROE);
- 3) *Timing of Return* (waktu perolehan laba); dan
- 4) *Future Prospect* (prospek ke depan/ di masa yang akan datang).

Dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka kesehatan bank dapat diukur sesuai ketentuan tersebut. Selanjutnya agar kredit yang disalurkan oleh suatu bank memiliki kualitas kredit yang baik, maka perlu dilakukan pemisahan fungsi dalam organisasi kredit.

Dalam praktiknya pemisahan fungsi dalam organisasi kredit pada umumnya terdiri dari:

- 1) Pemasaran kredit
- 2) Analisis kredit
- 3) Taksasi jaminan
- 4) Administrasi kredit
- 5) Audit kredit

Tujuan pemisahan dari fungsi kredit adalah agar pengelolaan suatu permohonan kredit dapat diproses secara benar, lengkap, teliti, dan sempurna, sehingga memiliki risiko rendah dan tidak menimbulkan masalah dimasa yang akan datang.

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

1. Lancar (*pas*), artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*), dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; kadang-kadang terjadi cerukan; jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; mutasi rekening relatif aktif; didukung dengan pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (*Substandard*), artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; sering terjadi cerukan; terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

lebih dari 90 hari; frekuensi mutasi rekening relatif rendah; terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*), artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; terjadi cerukan yang bersifat permanen; terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; terjadi kapitalisasi bunga; dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*Loss*), artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.1.2.7. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk

mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Adapun analisa dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut.

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode 7 P adalah sebagai berikut.

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan *output* agregat (barang dan jasa) atau PDB yang terus menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan pendapatan nasional.

2.1.3.2. Pengertian Pendapatan Nasional

Menurut Sukirno (2015) pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Secara fiktif pendapatan nasional merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu

negara, dalam kurun waktu tertentu prinsip ini mewakili konsep Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB).

Berikut ini akan diuraikan beberapa konsep penting mengenai pendapatan nasional.

1. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)

PDB adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga negara yang bersangkutan ditambah warga negara asing yang bekerja di negara yang bersangkutan. PDB menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang beralokasi dalam perekonomian tersebut *output* nya diperhitungkan dalam PDB. Akibatnya, PDB kurang memberikan gambaran tentang berapa sebenarnya *output* yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian domestik

- a. Produk Domestik Bruto Nominal, adalah diukur dari produksi barang dan jasa akhir harga-harga yang berlaku di masa sekarang
- b. Produk Domestik Bruto Riil, adalah diukur dari produksi barang dan jasa dengan harga-harga tetap, dimana ditetapkan dimasa lampau dan berlaku sampai sekarang. PDB riil tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, perubahan PDB riil merupakan ukuran dari perubahan produksi barang dan jasa. Ketika mengukur pertumbuhan ekonomi maka yang diukur adalah persentase dari pertumbuhan PDB riil. Sedangkan PDB nominal sudah dipengaruhi oleh perubahan harga atau kenaikan harga.

2. Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*)

PNB adalah jumlah dari seluruh nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang dihasilkan dalam setahun. Dalam jumlah barang akhir itu termasuk barang konsumsi maupun barang modal. Barang modal yang dimaksud meliputi barang modal baru yang merupakan tambahan pada jumlah peralatan modal yang sudah ada, barang modal untuk mengganti sebagian atau seluruh peralatan barang yang lama.

- a. Produk Nasional Bruto Nominal, mengukur nilai *output* dalam suatu periode tertentu menurut harga pasar pada periode tersebut, atau kadang-kadang disebut *current dollars* (dollar saat ini).
- b. Produk Nasional Bruto Riil, mengukur perubahan-perubahan *output* fisik di dalam perekonomian antara periode waktu yang berbeda dengan menilai semua barang yang diproduksi dalam dua periode itu pada harga yang sama, atau pada dollar/rupee yang konstan.

2.1.3.3. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan angkatan kerja. Banyak ekonom meyakini bahwa kualitas input tenaga kerja, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan disiplin angkatan kerja, adalah satu-satunya unsur penting dari pertumbuhan ekonomi.

2. Sumber Daya Alam

Sumber-sumber daya yang penting ini adalah tanah yang baik untuk ditanami, minyak dan gas, hutan, air dan mineral. Beberapa negara berpendapatan tinggi seperti Kanada dan Norwegia telah mengalami pertumbuhan terutama berdasarkan landasan sumber daya yang sangat besar, dengan *output* besar dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Demikian pula dengan Amerika Serikat, dengan lahan-lahan pertanian yang subur, merupakan produsen dan pengeksport gandum terbesar di dunia. Namun pemilikan SDA tidak merupakan keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern. *New York City* menjadi makmur terutama karena industri jasa yang sangat tinggi. Banyak negara, seperti Jepang, sebenarnya tidak memiliki SDA namun berkembang pesat berkat pemusatan perhatian pada sektor-sektor yang lebih bergantung pada tenaga kerja dan modal daripada pada sumber-sumber daya asli. Hongkong yang kecil, dengan luas wilayah hanya sepenggal Rusia yang kaya sumber daya, sesungguhnya memiliki volume perdagangan internasional yang lebih besar dari pada negara raksasa itu.

3. Pembentukan Modal

Ingatlah bahwa modal nyata mencakup struktur-struktur seperti jalan dan pembangkit tenaga listrik, peralatan seperti truk dan komputer, dan persediaan barang (*stock of inventories*). Kisah paling dramatis dalam sejarah ekonomi sering melibatkan akumulasi modal.

4. Perubahan Teknologi dan Inovasi

Kemajuan teknologi telah menjadi unsur vital keempat dari pertumbuhan standar hidup yang pesat. Dalam sejarah, pertumbuhan sama sekali bukan merupakan proses peniruan sederhana, dengan menambah deretan pabrik baja atau pembangkit tenaga listrik di sebelah lain. Sebaliknya, arus penemuan dan kemajuan teknologi yang tidak pernah berakhir menyebabkan kemajuan sangat besar dalam kemungkinan produksi di Eropa, Amerika Utara dan Jepang. Perubahan teknologi menunjukkan perubahan proses produksi atau pengenalan produk atau jasa baru. Perkembangan teknologi paling dramatis dari zaman modern terjadi pada bidang elektronik dan komputer.

2.1.3.4. Teori dan Model Pertumbuhan

a. Teori dan Model Pertumbuhan Neoklasik

Ada dua aliran pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi (dilihat dari *Agregat Supply*/produksi), yakni teori neoklasik dan teori modern. Dalam kelompok teori neoklasik, faktor-faktor produksi yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan *output* adalah jumlah tenaga kerja dan modal; yang terakhir ini bisa dalam bentuk keuangan atau barang modal (seperti mesin). Penambahan jumlah tenaga kerja dan modal, dengan asumsi produktifitas dari masing-masing faktor produksi tersebut (*productivity parsial*; PFP) atau produktifitas faktor total (TFP) tetap tidak berubah, menambah *output* yang dihasilkan. Persentase pertumbuhan *output* bisa lebih besar (*increasing return to scale*), lebih kecil (*decreasing return to scale*), atau

sama (*constant return to scale*) dibandingkan persentase pertumbuhan jumlah dari kedua faktor produksi tersebut.

Dalam model pertumbuhan neoklasik, peran teknologi dan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas dari tenaga kerja dan dari *input-input* produksi lainnya terhadap pertumbuhan *output* tidak mendapat perhatian secara eksplisit atau dianggap konstan (teknologi dianggap suatu koefisien yang tetap tidak berubah). Teori Neoklasik lebih fokus pada efek akumulasi investasi/modal, dan penambahan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan *output*. Oleh karena itu, didalam model pertumbuhan neoklasik, tidak ada yang namanya peningkatan produktivitas dari *input-input* produksi.

b. Teori Modern dan Model Pertumbuhan Endogen

Dalam teori modern, faktor-faktor produksi yang krusial tidak hanya tenaga kerja dan modal, tetapi juga perubahan tanah (yang terkandung di dalam barang modal atau mesin), energi, kewirausahaan (kw), bahan baku (BB) dan material (Mt). selain itu, faktor-faktor yang lain oleh teori modern juga dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah (dicerminkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah), birokrasi, dan dasar tukar internasional (*term of trade; ToT*).

Dilihat dari kerangka pemikiran kelompok teori modern, ada sejumlah perbedaan yang mendasar dengan kelompok teori neoklasik. Diantaranya adalah yang mencakup tenaga kerja, modal, dan Kewirausahaan. Dalam kelompok teori modern, kualitas tenaga kerja lebih penting daripada kuantitasnya. Kualitas tenaga

kerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan, tetapi juga kondisi kesehatannya. Sekarang ini tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan menjadi dua variabel bebas yang penting didalam analisis-analisis empiris dengan pendekatan ekonometris mengenai pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan endogen juga sangat relevan untuk menganalisis laju serta pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama karena dampak dari kemajuan iptek serta peningkatan kualitas SDM terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri semakin nampak jelas saat ini dibandingkan 30 tahun yang lalu. Salah satu model pertumbuhan neoklasik yang bisa di endogen adalah dari Harrod-Domar, yang intinya adalah suatu relasi antara penambahan modal dan pertumbuhan ekonomi (PDB). Dua variabel fundamental dari model ini adalah penambahan modal dan rasio penambahan modal terhadap pertumbuhan PDB (Y). Rasio ini disebut ICOR= $\Delta K/\Delta Y$. Sejak penambahan K adalah investasi (I) dalam definisi maka $ICOR = I/\Delta Y$.

Model Harrod-Domar ini adalah suatu modifikasi dari model-model pertumbuhan dari Domar dan Harrod. Model dari Domar lebih memfokuskan pada laju pertumbuhan investasi ($= \Delta I/I$), didalam modelnya, I ditetapkan harus tumbuh atau suatu persentase yang konstan, sejak s (*marginal propensity to save*), yakni rasio dari pertumbuhan tabungan nasional (S) terhadap peningkatan Y, dan ICOR kedua-duanya konstant. Sedangkan penekanan dari model Harrod lebih pada pertumbuhan Y jangka panjang. Didalam modelnya, laju pertumbuhan keseimbangan (*warranted growth*) yang membuat besarnya S yang direncanakan ditetapkan selalu sama dengan besarnya I yang direncanakan, yaitu:

$$sY_t = ICOR (Y_t - Y_{t-1})$$

$$(Y_t - Y_{t-1}) / Y_t = s/ICOR$$

Model ini tidak saja menekankan pentingnya I bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pentingnya S sebagai sumber utama pembiayaan I tersebut. Oleh karena itu, model ini sangat relevan sebagai salah satu alat analisis empiris untuk kasus Indonesia. Selama masa orde baru, telah terbukti bahwa I memang merupakan salah satu faktor krusial bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Terbukti juga, selama krisis ekonomi, lesunya kegiatan I di dalam negeri membuat kondisi perekonomian nasional semakin buruk. Dengan tingkat S yang masih terbatas, Indonesia terpaksa menggantungkan diri pada pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing untuk mempertahankan kegiatan I yang diperlukan di dalam negeri.

Setiap ekonom/negara membutuhkan I minimum untuk mempertahankan kapasitas produksi. Kapasitas produksi/*output* potensial didefinisikan sebagai *output* maksimum yang dapat dihasilkan dalam suatu negara pada waktu tertentu dalam keadaan normal.

c. Pertumbuhan TFP

Berdasarkan studi-studi empiris mengenai pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumbernya, Pack dan Page (1994) menyatakan bahwa terdapat dua sumber utama pertumbuhan, yakni pertumbuhan yang bersumber dari peningkatan I (*investment-driven growth*). Sumber pertama tersebut merujuk pada pertumbuhan yang terutama terjadi akibat meningkatnya pemakaian faktor produksi, khususnya K (misalnya penambahan jumlah mesin). Sedangkan sumber

kedua terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas (efisiensi) dari faktor produksi, yang mencerminkan antara lain progress T.

Sudah banyak studi empiris yang mengukur peran dari pertumbuhan TFP terhadap pertumbuhan ekonomi atau *output* dari sektor-sektor ekonomi. Diantaranya dari Kim dan Lau (1994) yang menemukan bahwa pertumbuhan TFP bukan merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi di NICs (kecuali korea selatan), tetapi akumulasi K(I) dengan kontribusinya sekitar 48%-72%, dibandingkan kontribusi dari pertumbuhan TFP sekitar 46%-71%. Di Jepang juga demikian, penambahan K adalah faktor penting pertama, sedangkan pertumbuhan TFP faktor penting kedua. Sebaliknya untuk negara-negara OECD, pertumbuhan TFP merupakan sumber utama pertumbuhan PDB.

2.1.3.5. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Modern

Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.

Dalam tulisannya yang berjudul *Modern Economic Growth: Findings and Reflection* dalam *American Economic Review* (1973), Kuznets mengungkapkan enam karakteristik yang terjadi dalam proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju yaitu:

1. Tingginya tingkat pertumbuhan *output* per kapita dan penduduk.
2. Tingginya tingkat kenaikan produktifitas faktor produksi secara keseluruhan terutama produktivitas tenaga kerja.
3. Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi.
4. Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi.
5. Secara ekonomis, ada kecenderungan bagi negara-negara maju untuk menjangkau seluruh dunia guna mendapatkan pasar dan bahan baku atas produk-produk mereka.
6. Pertumbuhan ekonomi ini terbatas hanya pada sepertiga populasi dunia.

2.1.3.6. Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan. Berikut rumus untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sukirno, 2004).

$$Y = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Y = Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDB_t = Produk Domestik Bruto ADHK tahun sekarang

PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto ADHK tahun sebelumnya

2.1.4. Suku Bunga Kredit

2.1.4.1. Pengertian Suku Bunga

Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Menurut Hubbard (1997), bunga adalah biaya yang harus dibayar *borrower* atas pinjaman yang diterima dan imbalan bagi *lender* atas investasinya. Sementara itu, Kern dan Guttman (1992) menganggap suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya, maka tingkat suku bunga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Menurut Karl and Fair (2001), suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.

Menurut Mishkin (2007), suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayar atas penyewaan dana. Mishkin memandang suku bunga dari sisi peminjam (*borrower*).

Menurut Pindyck (2005), suku bunga adalah harga yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Seperti harga pasar, penentuan tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari *loanable funds*.

Siamat (2005) membedakan pengertian bunga (*interest*) dalam 2 perpektif, yaitu: (1) bunga dari sisi permintaan. Bunga dari sisi permintaan dan penawaran merupakan pendapatan atas pemberian kredit. Bunga merupakan sewa atau harga dari uang, (2) bunga dari sisi penawaran. Pemilik dana akan menggunakan atau mengalokasikan dananya pada jenis investasi yang menjanjikan pembayaran bunga yang lebih tinggi.

2.1.4.2. Teori Tingkat Bunga

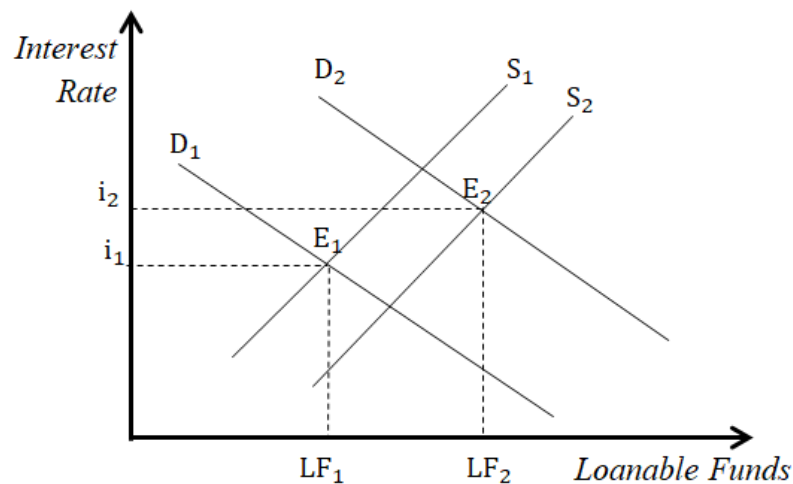
Dalam menentukan tingkat suku bunga terdapat berbagai macam teori yang menjelaskan bagaimana mekanisme pergerakan suku bunga. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Dalam teori klasik yang dikutip dari Boediono (1980), bunga adalah harga dari *loanable funds* (dana investasi). Teori ini dikembangkan oleh kelompok ekonom klasik pada abad ke-19. Tingkat bunga adalah salah satu indikator dalam memutuskan apakah seseorang akan menabung atau melakukan investasi. Semakin tinggi tingkat bunga maka akan semakin banyak pula dana yang ditawarkan. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara tingkat bunga dengan jumlah dana yang ditawarkan (Boediono, 1991). Pada prinsipnya, tingkat bunga adalah harga yang harus dibayarkan atas penggunaan dana untuk setiap unit waktu yang telah ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran.

Permintaan akan *loanable funds* memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga. Dengan asumsi pendapatan dan faktor-faktor lainnya konstan. Peningkatan tingkat bunga akan menurunkan permintaan terhadap dana peminjaman

(*loanable funds*). Asumsi-asumsi tersebut berlaku pada perekonomian dalam keadaan *full employment*, harga konstan, *supply of money* tetap, dan informasi sempurna.



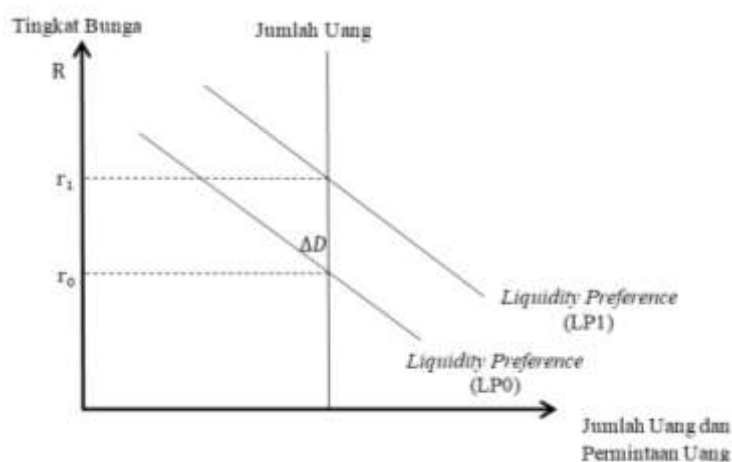
Gambar 2.1
Kurva Keseimbangan di Pasar Dana
Sumber : Boediono (1980)

Pada gambar 2.1 sumbu horizontal menunjukkan *Loanable Funds* (Dana Investasi) dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat suku bunga. Dari sisi penawaran pada titik keseimbangan di E_1 tingkat suku bunga mengalami peningkatan dari i_1 ke i_2 maka Lf akan bergeser ke arah kanan dari LF_1 ke LF_2 artinya ketika suku bunga naik maka akan semakin banyak dana yang ditawarkan atau kurva D (*demand*) bergeser ke arah kanan dari D_1 ke D_2 yang mana terdapat hubungan positif antara tingkat bunga dengan jumlah yang ditawarkan. Sedangkan pada sisi permintaan titik kesesimbangan di E_2 ketika tingkat bunga naik dari i_1 ke i_2 yang menyebabkan Lf bergeser ke arah kanan dari LF_1 ke LF_2 artinya ketika suku bunga naik maka dana yang diminati akan menurun atau kurva

S (*Supply*) bergeser ke arah kanan dari S_1 ke S_2 yang mana terdapat hubungan negatif antara tingkat bunga dengan dana investasi (*Loanable Funds*).

2. Teori Keynesian: *Liquidty Preference Theory*

Uang menurut Keynes (1936), sebagaimana dikutip dari Boediono(1980), merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki masyarakat. Alasan masyarakat memegang uang adalah untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Keynes (1936) menganggap bahwa permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak peka terhadap tingkat bunga. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan *liquidty preference* adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang menghubungkan permintaan uang dengan tingkat bunga (Miller dan Pulsmelli, 1980).



Gambar 2.2
Kurva Teori Keynes Mengenai Hubungan Jumlah dan Permintaan
Uang Terhadap Suku Bunga

Sumber : Nopirin (1984)

Pada gambar 2.2, sumbu horizontal mengukur jumlah dan permintaan uang, dan sumbu vertikal untuk tingkat bunga. Kenaikan GNP akan

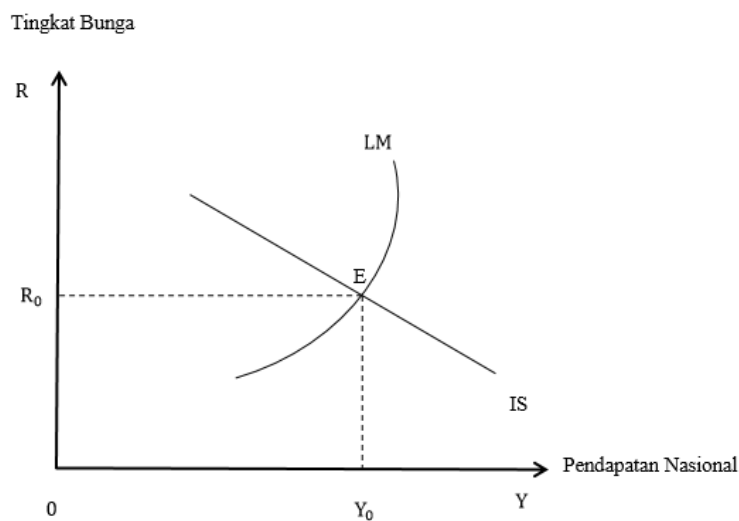
menyebabkan bergesernya kurva permintaan akan uang dari LP_0 ke LP_1 . Apabila jumlah uang tetap, maka tingkat bunga akan naik dari r_0 ke r_1 . Sebab pada tingkat bunga r_0 , masyarakat mengalami kekurangan uang kas (kelebihan permintaan sebesar ΔD). Untuk memenuhi kekurangan ini, usaha yang dilakukan adalah menjual surat berharga, sehingga tingkat bunga naik (harga surat berharga turun) sampai keseimbangan tercapai pada r_1 . Dengan kenaikan GNP, maka pada setiap tingkat bunga masyarakat menghendaki jumlah uang kas yang lebih besar untuk transaksi sehingga kurva LP bergeser ke kanan atas.

3. Sintesa Klasik dan Keynesian: IS-LM

Sintesa klasik tingkat bunga timbul karena uang adalah produktif dan sebagai dana investasi. Dana ditangan pengusaha bisa menambah modal dan mendatangkan keuntungan yang tinggi. Dengan kata lain, uang dapat meningkatkan produktifitas dan karena adanya kenaikan produktifitas ini maka pengusaha mau membayar bunga. Sedangkan sintesa Keynes menekankan uang sebagai aktiva likuid untuk memperoleh keuntungan di pasar keuangan (Boediono, 1980).

Kedua sintesa tersebut dikombinasikan dalam sintesa Hicks yang berhasil dalam mengintegrasikan keempat faktor seperti tabungan, investasi, permintaan uang untuk spekulasi dan penawaran uang dengan pendekatan IS-LM. Interpretasi Hicks dikembangkan lebih lanjut oleh Alvin P. Hansen sehingga model IS-LM disebut pula sebagai model Hicks-Hansen. Kurva LM menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan

nasional yang memungkinkan pasar uang-modal berada dalam keseimbangan. Kurva IS menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang memungkinkan pasar barang dan jasa dalam keseimbangan (Rahardja dan Manurung, 2008).



Gambar 2.3
Kurva Pendekatan IS-LM Tentang Tingkat Bunga

Sumber : Boediono (1980)

Pada gambar 2.3 sumbu horizontal mengukur pendapatan nasional, dan sumbu vertikal untuk tingkat bunga. Titik E merupakan ekuilibrium di pasar barang dan pasar uang. Yakni saat *actual expenditure* setara dengan *planned expenditure*, dan *demand for real money balances* setara dengan *money supply*.

2.1.4.3. Jenis-jenis Suku Bunga Kredit

Suku bunga kredit sangat bergantung pada jenis kredit itu sendiri. Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, menurut tujuan penggunaannya, kredit dibedakan menjadi tiga yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.

Kredit modal kerja (*working capital loan*) adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usahanya atau perputaran modal misalnya pembelian barang dagangan. Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai. Jangka waktu kredit ini umumnya lebih dari satu tahun.

Kredit konsumsi (*consumer loan*) adalah kredit yang diberikan bank untuk membiayai pembelian barang, yang tujuannya tidak untuk usaha tetapi untuk pemakaian pribadi. Jangka waktu kredit ini dapat berjangka waktu panjang atau pendek.

2.1.4.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga (pinjaman dan simpanan) adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dana

Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat maka yang dilakukan oleh bank tersebut agar dana cepat terpenuhi yaitu dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan suku bunga simpanan secara otomatis akan meningkatkan suku bunga pinjaman.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam jika ingin cepat memperoleh kebutuhan dana, maka suku bunga untuk simpanan harus lebih besar dari suku bunga pesaing. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman harus lebih kecil dari suku bunga pesaing.

3. Kebijakan Pemerintah

Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman suatu bank tidak boleh melebihi bunga yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu suku bunga BI.

4. Harga Laba Yang Diinginkan

Sesuai dengan target yang diinginkan besar, maka tingkat suku bunga besar dan sebaliknya.

5. Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besar kemungkinan resiko dimasa akan datang.

6. Kualitas Jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga pinjaman yang dibebankan dan sebaliknya.

7. Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh pinjaman sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko pinjaman macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Hubungan Baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya berdasarkan keaktifan dan loyalitas terhadap pihak bank yaitu nasabah utama dan nasabah biasa. Nasabah utama biasanya memiliki hubungan baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunga juga akan berbeda dengan nasabah biasa.

9. Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima pinjaman, biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda.

10. Produk yang Kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit jaminan, karena produk yang dibiayai laku di pasaran.

2.1.4.5. Komponen-Komponen dalam Menentukan Bunga Kredit

Adapun komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain:

1. Total Biaya Dana (*cost of fund*)

Merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib (*reserve requirement*) yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana

tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Semakin besar/mahal bunga yang dibebankan, maka semakin tinggi pula dananya.

2. Laba yang diinginkan

Merupakan laba/ keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Penentuan besarnya laba juga sangat memengaruhi besarnya bunga kredit.

3. Cadangan risiko kredit macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya.

4. Biaya operasi

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya.

5. Pajak

Yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

Suku bunga kredit yang diberikan kepada debitur memiliki dasar suku bunga atau suku bunga minimum yang sebelumnya juga telah ditetapkan oleh bank dan disebut Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi

Informasi Suku Bunga Dasar Kredit. SBDK adalah bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi bank dalam menentukan bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah bank.

SBDK yang telah ditetapkan oleh bank, harus diumumkan untuk memberi kejelasan kepada nasabah. Transparansi informasi mengenai SBDK juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan antara lain melalui terciptanya disiplin pasar yang lebih baik (Surat Edaran Bank Indonesia, 2011).

2.1.4.6. Jenis-Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Adapun metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) *Flate rate*

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flate rate* ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau kredit konsumtif lainnya.

2) *Sliding rate*

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun sehingga seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Jenis *sliding rate* ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjamannya.

3) *Floating rate*

Metode ini menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan, yaitu bisa tetap, naik atau turun.

2.1.5. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

2.1.5.1. *Pengertian Modal (Capital)*

Modal merupakan sejumlah dana yang besarnya telah ditetapkan yang berasal dari pemilik perusahaan sebagai pendirian usaha yang dapat digunakan dalam berbagai aktivitas bank. Dalam perbankan, modal merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi agar segala operasional bank dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Modal pada umumnya digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan dalam melaksanakan kegiatan operasional bank. Sehingga, perusahaan tersebut dapat menjalankan operasionalnya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai. Berikut beberapa fungsi modal bagi bank yaitu:

- a. Modal sebagai penyerap berbagai kerugian yang disebabkan oleh berbagai kegagalan dalam menjalankan operasional.
- b. Modal sebagai patokan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- c. Modal sebagai alat pengukuran tingkat kinerja keuangan bank dalam menghasilkan keuntungan.

2.1.5.2. Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Dalam perbankan untuk penilaian *capital* atau permodalan dapat menggunakan rasio yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga. Apabila modal yang dimiliki bank dapat menyerap kerugian, maka bank dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih baik. Sebaliknya, apabila modal yang dimiliki tidak memenuhi untuk menyerap kerugian tersebut maka operasionalnya tidak dapat berjalan dengan baik yang dapat menurunkan citra bank di masyarakat.

Rasio ini menggambarkan modal inti perusahaan yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan. Semakin besar nilai CAR maka semakin besar kemampuan bank dalam memperoleh laba, karena dengan modal yang besar berarti bank dapat menampung segala risiko kerugian yang terjadi serta dapat menginvestasikan modalnya pada sektor yang menguntungkan. Namun, semakin kecil nilai CAR maka semakin kecil pula peluang untuk memperoleh laba, sebab dengan modal kecil belum tentu mampu menampung segala risiko kerugian yang terjadi sehingga sulit bagi bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas maka perhitungan terhadap modal sangatlah penting. Sebab, dengan perhitungan modal maka dapat diketahui kinerja keuangan bank dalam memperoleh keuntungan. Sehingga manajemen dapat mengelola modal yang ada dengan bijak agar segala aktivitas bank dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Tingkat kecukupan modal

bank diukur berdasarkan perhitungan *capital adequacy*. Perhitungan *adequacy* ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman modal yang mengandung risiko harus menyediakan jumlah modal sebesar presentase tertentu (*risk margin*) terhadap jumlah penanamannya. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula *risk margin*-nya, yang berarti semakin banyak modal yang harus disediakan. Suatu bank dapat diklasifikasikan sehat permodalanya apabila bank tersebut dapat memelihara rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) sekurang-kurangnya 8 persen. Tingkat kecukupan modal bank (*Capital Adequacy Ratio*) diperoleh dengan cara membandingkan jumlah modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Berdasarkan pada ketentuan *Bank for International Settlements* penilaian terhadap modal menggunakan rumus:

$$\text{CAR} = \text{Modal} / \text{ATMR} \times 100 \%$$

Keterangan:

CAR = *Capital Adequacy Ratio* (Rasio Kecukupan Modal Bank)

Modal = Modal Inti + Modal Pelengkap

ATMR = Neraca Aktiva + Neraca Administrasi

2.1.5.3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal sebuah bank. Menurut (Soedarto, 2004) Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, permodalan bank dibedakan menjadi :

1. Modal Inti

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dengan perincian sebagai berikut.

a. Modal Disetor

Modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.

b. Agio Saham

Selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

c. Cadangan Umum

Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.

d. Cadangan Tujuan

Bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

e. Laba Ditahan

Saldo bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham/rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

f. Laba Tahun Lalu

Laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham/rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50 persen. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

g. Laba Tahun Berjalan

Laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

- h. Bagian Kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

2. Modal pelengkap

Modal Pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal, terdiri dari :

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap. Cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari direktorat Jenderal Pajak.
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan. Cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.
- c. Modal kuasi. Modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.
- d. Pinjaman subordinasi. Pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti pinjaman tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka 5 tahun, dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus lurus atas persetujuan Bank Indonesia.

2.1.6. Covid-19 (*Dummy*)

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Neng Yesi Susanti: 2020) *new coronavirus* merupakan jenis penyakit baru dari *coronavirus* yang menyebabkan infeksi sistem pernapasan. Proses mutasi dari virus korona menyebabkan adanya virus yang kita kenal saat ini yaitu virus 2019 Novel *Coronavirus* (2019-nCoV) atau Covid-19 yang dapat menular ke manusia (*zoonotic*). Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina dimana tingkat penyebarannya sangat cepat.

Coronavirus ini merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Menurut Xia, Zhang, Xue, Sun & Jin (2015) dalam buku *Anomalia*

Covid-19 virus ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia dan *middle-East Respiratory*. Infeksi virus corona atau Covid-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti hidung berair dan meler, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan dan demam; atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, batuk berdarah, sesak napas dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala yang menandakan orang terinfeksi virus corona yaitu demam, batuk dan sesak napas. Gejala Covid-19 tersebut menurut penelitian muncul dalam waktu dua hari sampai dua minggu setelah terpapar virus MERS dan SARS.

Menurut Petersen, Pollack, & Madoff (2014) dalam buku *Anomalia Covid-19*, seseorang dapat tertular Covid-19 melalui berbagai cara yaitu:

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita Covid-19.
2. Memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita.
3. Kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19 misalnya bersentuhan atau berjabat tangan.
4. Virus corona akan menginfeksi siapa saja, tapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah.

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.1 akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian ini, sebagai acuan dalam melakukan penelitian tentang analisis determinasi penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Indonesia tahun 2011-2021. Melalui penelitian terdahulu dapat diketahui pengaruh antar variabel x dan y yang telah di uji pada penelitian sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	R.E. Sitanggang, dkk. (2021)	<i>Analisis Pengaruh Tingkat Bunga, Tukar, Adanya Pandemi Covid-19 terhadap Permintaan Kredit UMKM di Sulawesi Utara</i>	Analisis penyaluran kredit UMKM dengan variabel tingkat suku bunga dan Covid-19	Nilai tukar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bunga berpengaruh negatif tidak signifikan, nilai tukar berpengaruh positif tidak signifikan dan Covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit UMKM.
2.	<i>Evita Hayatun Nufus., dkk. (2021)</i>	<i>Analysis of COVID-19 Impact on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Credit Distribution in East Java Banks.</i>	Analisis penyaluran kredit UMKM dengan variabel Covid-19	DPK, BI Rate, dan Inflasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan, inflasi berpengaruh positif tidak signifikan, sedangkan BI Rate dan covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	M. Rizky Arief Sefriawa dan Khirstina Curry (2018)	Analisis Pengaruh <i>Spread</i> Tingkat Suku Bunga, LDR, dan CAR terhadap Penyaluran Kredit UMKM pada Bank Buku 4 Periode 2015-2017	Analisis penyaluran kredit UMKM dengan variabel CAR	<i>Spread</i> tingkat suku bunga, dan LDR	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama <i>Spread</i> tingkat suku bunga, CAR, dan LDR berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM. Sedangkan secara parsial diperoleh hasil bahwa variabel CAR dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM sedangkan variabel <i>spread</i> tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM.
4.	Nensy Ratnasari, Yoyok Soesatyo (2016)	Variabel-variabel yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Kepada UMKM oleh Perbankan di Indonesia Tahun 2011-2015	Analisis penyaluran Kredit UMKM dengan menggunakan variabel CAR, dan pertumbuhan ekonomi	inflasi, BI <i>Rate</i> , NPL, dan DPK	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Inflasi dan BI <i>Rate</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, NPL, CAR, dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Secara bersama-sama variabel bebas dan variabel terikat saling berpengaruh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					positif dan signifikan terhadap kredit UMKM.
5.	Fitri Kaidar (2012)	Pengaruh <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan Suku Bunga Kredit terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Pemerintah	Analisis Penyaluran kredit UMKM dengan menggunakan variabel CAR, dan Suku Bunga Kredit	LDR	Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR, CAR, suku bunga kredit secara simultan dan parsial menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit oleh perbankan.
6.	Dhini Nur Azizah (2019)	Analisis Pengaruh CAR, NPL, LDR dan Inflasi Terhadap penyaluran Kredit UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia, TBK. 2010.Q1-2017.Q2	Analisis penyaluran Kredit UMKM dengan menggunakan variabel CAR	NPL, LDR, dan Inflasi	Hasil analisis diketahui bahwa pengaruh CAR, dan LDR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM, NPL dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM.
7.	Katerose Margareta Sanggor,., dkk (2021)	Analisis Determinan Penyaluran Kredit UMKM pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2014.1-2019.4	Analisi penyaluran kredit UMKM dengan menggunakan Variabel Suku Bunga kredit, dan CAR.	NPL dan LDR	Hasil penelitian ini menunjukkan, Tingkat Suku Bunga, NPL, mempunyai pengaruh yang negatif terhadap Penyaluran Kredit UMKM. Variable <i>LDR</i> , CAR mempunyai pengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit UMKM.
8.	Wiyanti (2014)	Analisis Pengaruh CAR, ROA, NPL, BOPO, dan DPK terhadap Penyaluran Kredit UMKM	Analisi penyaluran kredit UMKM dengan menggunakan Variabel CAR	ROA, BOPO dan DPK	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA, NPL berpengaruh positif tidak

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		di Indonesia (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2012)			signifikan, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DPK berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan secara bersama-sama CAR, ROA, NPL, BOPO dan DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.
9.	Muhamad Ilham Ashari (2017)	Analisis Pengaruh <i>Spread</i> Tingkat Suku Bunga, Rasio Keuangan Bank (CAR, NPL, LDR), dan BI <i>Rate</i> terhadap Penyaluran Kredit UMKM pada Bank Umum <i>Go Public</i> di Indonesia.	Analisis penyaluran kredit UMKM dengan menggunakan Variabel Rasio Keuangan (CAR)	<i>Spread</i> Tingkat Suku Bunga, Rasio Keuangan Bank (LDR, NPL), dan BI <i>Rate</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>spread</i> tingkat suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Indonesia, CAR dan LDR berpengaruh positif dan signifikan.
10.	Hj. Asniar Ismail (2018)	Determinan penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan Barat	Analisis penyaluran kredit UMKM dengan menggunakan variabel pertumbuhan Ekonomi	Inflasi, DPK, dan NPL	Hasil penelitian menunjukan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan sedangkan Inflasi, DPK dan NPL berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM di Kalimantan Barat.
11.	Farida Qusnul dan Suci Atiningsih (2018)	Pengaruh DPK, NPL, LDR dan Suku Bunga Kredit terhadap Penyaluran	Analisis penyaluran kredit UMKM dengan variabel Suku Bunga Kredit	DPK, NPL dan LDR	Hasil penelitian DPK, LDR berpengaruh positif signifikan, NPL, Suku Bunga Kredit tidak

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kredit UMKM (Studi pada BPR di Kota Semarang Tahun 2013- 2016)			berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.
12.	Nuramalia Hasanah dan Yona Priantina (2017)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Rasio Kecukupan Modal terhadap Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Umum di Indonesia Tahun 2007 – 2013	Analisis penyaluran kredit UMKM dengan variabel suku bunga kredit dan CAR	Inflasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bunga berpengaruh negatif dan inflasi berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM oleh bank-bank di Indonesia, sedangkan rasio kecukupan modal tidak berpengaruh.
13.	Maya Puspita Sari dan Musaroh (2018)	Determinan Penyaluran Kredit UMKM pada Bank Umum Konvensional di Indonesia	Analisis Kredit UMKM dengan variabel CAR	DPK, NPL, dan BOPO	Hasil penelitian menunjukkan DPK, CAR berpengaruh positif dan signifikan, NPL dan BOPO tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM.
14.	Agus Kusmana (2021)	Determinan Penyaluran Kredit Umkm Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Depok	Analisis penyaluran kredit UMKM dengan variabel CAR	LDR, NPL, BOPO	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR, NPL, dan BOPO memiliki pengaruh terhadap Penyaluran Kredit, sedangkan LDR tidak memiliki pengaruh terhadap Penyaluran Kredit.
15.	Tien Yustini (2015)	Pengaruh Suku Bunga, Jumlah Perusahaan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyaluran Kredit Modal	Analisis penyaluran Kredit UMKM dengan variabel Suku Bunga Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga, pertumbuhan ekonomi dan jumlah perusahaan

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kerja UMKM Sumatera Selatan	bagi di		berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja bagi UMKM di Sumatera Selatan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian, dimunculkan kerangka pemikiran untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga kredit, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Covid-19 (*dummy*) terhadap penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Indonesia tahun 2011-2021.

2.2.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyaluran Kredit UMKM

Model Harrod-Domar menunjukkan betapa pentingnya tabungan (*saving*) untuk mendukung investasi guna menciptakan pertumbuhan. Menurut Domar peningkatan tabungan akan meningkatkan kapital stok, yang berarti tersedianya dana untuk mendukung investasi. Penyaluran dana kepada dunia usaha maka akan dapat meningkatkan *output* yang dihasilkannya.

Secara teori, kredit perbankan memiliki hubungan kausalitas yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena semakin tinggi kredit disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan memacu pertumbuhan ekonomi pada sektor yang disalurkan kredit dan akhirnya dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kredit digunakan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, dimana kredit sebagai fungsi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan permintaan kredit yang semakin tinggi juga.

Menurut teori Klasik tentang uang menyakini bahwa semakin besar jumlah uang dipegang seseorang maka semakin banyak pula ia berbelanja dan semakin besar pula pendapatan nasional yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya permintaan akan barang akan berpengaruh pada meningkatnya permintaan/penyaluran kredit. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap permintaan/penyaluran kredit (Widayatsari dan Mayes 2009).

Hal ini diperkuat dengan penelitian Tien Yustini (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

2.2.2. Hubungan Suku Bunga Kredit Terhadap Penyaluran Kredit UMKM

Menurut Boediono (2010) Bila tingkat bunga rendah, permintaan pinjaman (kredit) akan bertambah karena akan semakin banyak investasi, modal kerja maupun konsumsi dengan asumsi *ceteris paribus*, dan begitu pula sebaliknya. Permintaan dana pinjaman berasal dari bisnis domestik, konsumen dan pemerintah serta pinjaman yang dilakukan oleh orang asing di pasar domestik akan berkurang.

Suku bunga merupakan biaya *borrower* atas pinjaman yang diterima *lender* atas investasi suku bunga cenderung memiliki pengaruh yang negatif

terhadap penyaluran kredit UMKM. Semakin tinggi bunga maka keinginan untuk berinvestasi akan semakin kecil. Suku bunga yang ditetapkan terlalu tinggi akan membuat pelaku usaha atau UMKM enggan untuk meminjam dan yang sudah meminjam tidak mampu untuk membayar kembali.

Hal ini diperkuat dengan penelitian Katerose Margareta Sanggor, dkk (2021) menunjukkan bahwa suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

2.2.3. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Penyaluran Kredit UMKM

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20-25 persen setahun (Wibowo, 2009). Sehingga semakin tinggi CAR dari suatu bank, maka akan semakin lancar pula penyaluran kredit yang dikucurkannya.

Hal ini diperkuat dengan penelitian Muhamad Ilham Ashari (2017) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

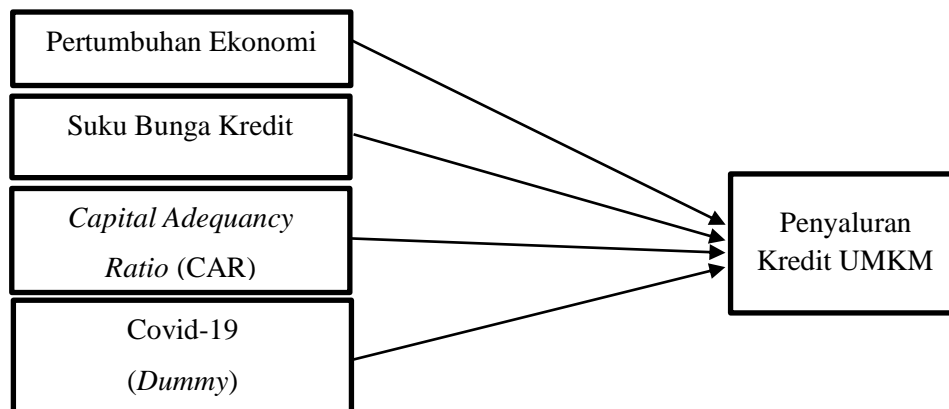
2.2.4. Hubungan Covid-19 Terhadap Penyaluran Kredit UMKM

Covid-19 merupakan virus yang disebabkan oleh virus sindrom pernafasan akut parah. Berdasarkan informasi dari gugus tugas Covid-19, virus ini memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat. Selain berdampak pada penurunan tingkat kesehatan masyarakat virus ini juga berdampak pada perekonomian secara global (Bartik, Bertrand, Cullen, Glaeser, Luca, & Stanton, 2020; Disemadi & Shaleh, 2020; Maital & Barzani, 2020; McKibbin & Fernando, 2020; Wyplosz, 2020).

Secara umum Covid-19 memiliki pengaruh negatif terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu yang terdampak adalah menurunnya keinginan masyarakat untuk melakukan kredit. Selain kredit ada banyak dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian.

Hal ini diperkuat dengan penelitian Ronal Edison Sitanggang, dkk (2021) bahwa Covid-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

Berikut ini gambar kerangka yang skematis mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi, suku bunga kredit, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Covid-19 (*dummy*) terhadap penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Indonesia.



Gambar 2.4
Model Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka dalam kajian penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif sedangkan suku bunga kredit dan Covid-19 (*dummy*) berpengaruh negatif secara parsial terhadap penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Indonesia tahun 2011-2021.
2. Diduga pertumbuhan ekonomi, suku bunga kredit, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Covid-19 (*dummy*) berpengaruh secara bersama-sama terhadap penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Indonesia tahun 2011-2021.